

Beneficial Owner **dalam** ***OECD Model Tax Convention (MTC):*** **Sejarah dan Perkembangan Terkini**

Terminologi *beneficial owner* dikenal pertama kali dalam *English Trust Law*¹. Dalam hukum Inggris tersebut, *beneficial owner* didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*).

A. Beneficial Owner pada OECD MTC Sebelum Era 2000

Dalam sejarah *OECD Model Tax Convention*, istilah *Beneficial Owner* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977. Istilah *beneficial owner* muncul pada Pasal 10 (*Dividend*), 11 (*Interest*) dan 12 (*royalty*), dalam upaya memberikan batasan yang jelas tentang pihak yang dapat dianggap sebagai penerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber atas penghasilan dividend, bunga, dan royalti. Pada saat itu, OECD MTC 1977 tidak memberikan definisi apapun terhadap istilah tersebut. Namun demikian, dalam paragraf 12 OECD MTC 1977 *commentaries on Article 10 (dividend)*, diberikan penegasan bahwa terminologi *beneficial owner* tidak meliputi *Agent* maupun *Nominee*. Secara spesifik disebutkan bahwa fasilitas pengurangan tarif pajak di negara sumber tidak dapat diberikan apabila dalam transaksi pembayaran penghasilan dividend, bunga, royalti tersebut terdapat pihak perantara seperti *Agent* dan *Nominee*, kecuali bila *beneficial owner* tersebut merupakan penduduk (*resident*) dari negara lain dalam perjanjian (*resident of the other contracting state*)².

Di tahun 1986, OECD kembali menggunakan terminologi *beneficial owner* pada publikasi laporan Commitee on Fiscal Affairs yang berjudul "*Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies*". Dalam publikasi tersebut, OECD menegaskan beberapa kondisi yang membuat pihak-pihak tertentu, termasuk *conduit companies*, dikecualikan dari pengertian *Beneficial Owner*. Pertama, keberadaan *conduit companies* yang berperan sebagai perantara antara penerima dan pembayar penghasilan membuka kemungkinan terciptanya suatu kondisi dimana fasilitas *tax treaty* diberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima fasilitas tersebut. Kedua, pemberian wewenang untuk membentuk perjanjian (kontrak) atau mengambil alih suatu kewajiban yang dalam kenyataan sebenarnya tidak lebih dari sekedar menjalankan fungsi administratif atau fidusiari dari perusahaan induknya sehingga dapat dikatakan bahwa pihak tersebut hanya mendapatkan wewenang yang sangat terbatas (*very narrow power*) dari pemilik yang sebenarnya. OECD menegaskan pembatasan-pembatasan tersebut mengingat pemberian fasilitas *tax treaty*

¹ hukum Inggris mengenai Trust

² *Paragraph 12 of commentaries on Article 10 of the 1977 OECD MTC:*

*"The limitation of tax in the State of source is **not** available when an intermediary, such as an agent or nominee, is interposed between the beneficiary and the payer, unless the beneficial owner is a resident of the other Contracting State."*

kepada pihak yang semata-mata merupakan perantara dengan wewenang yang relatif sangat kecil dari pemilik yang sebenarnya bersifat inkonsisten dengan tujuan pembentukan perjanjian *tax treaty*.

B. Beneficial Owner pada OECD MTC Era 2000 - 2010

Di tahun 2001, dalam publikasi laporan *OECD Steering Group on Corporate Governance* yang berjudul “*Behind the Corporate Veil : Using Corporate Entities for Illicit Purposes*”, OECD memberikan pengertian lebih lanjut terhadap terminologi *beneficial owner*. Dalam laporan tersebut, *beneficial owner* diartikan sebagai pihak (individu) penerima manfaat yang sebenarnya. Dalam penerapannya, untuk mengetahui siapa penerima manfaat yang sebenarnya, otoritas perpajakan perlu mengidentifikasi pemilik entitas yang sebenarnya. Misalnya, dalam hal perusahaan, pemilik didefinisikan sebagai pemegang saham (*shareholders*) atau anggota (*members*). Sedangkan dalam sebuah *partnership*, kepentingan terbesar dimiliki oleh pihak rekanan (*partners*), baik yang merupakan *partner* terbatas (*limited*) maupun *partner* umum (*general*). Bagi *trust* dan *foundations*, *beneficial owner* diartikan sebagai penerima manfaat, yang dapat meliputi *settlor* atau pendiri (*founder*).

Pada *OECD Model Tax Convention* versi 2002, yang diadopsi oleh *OECD council* pada tanggal 28 Januari 2003, keberadaan prinsip *beneficial owner* kembali dikaitkan dengan penerapan pasal 10 (*dividend*), 11 (*interest*), dan 12 (*royalti*). Namun seiring dengan upaya memberikan informasi yang lebih lengkap, dalam bagian *commentary* terhadap ketiga pasal dimaksud, OECD memberikan keterangan tambahan mengenai keberadaan prinsip *beneficial owner* tersebut.

Terhadap ketiga pasal tersebut, OECD menegaskan kembali bahwa terminology *beneficial owner* diperkenalkan pada OECD MTC untuk memperjelas makna “dibayarkan kepada” atau “*paid.....to a resident*” untuk menegaskan bahwa negara sumber tidak harus melepaskan hak pemajakannya atas penghasilan *dividend* yang dibayarkan semata-mata karena penghasilan tersebut diterima secara langsung oleh penduduk di negara lainnya dalam perjanjian. Terkait dengan hal tersebut, OECD menekankan bahwa *beneficial owner* tidak boleh diartikan dalam perspektif teknis yang sempit, melainkan harus disesuaikan dengan konteksnya dan dengan memperhatikan tujuan pembentukan *tax treaty* dimaksud, termasuk dalam kaitannya dengan upaya mencegah pemajakan berganda serta penghindaran dan penggelapan pajak³.

Dengan demikian, pemberian fasilitas tarif pajak yang lebih rendah oleh negara sumber terhadap penduduk dari negara lainnya dalam perjanjian dimaksud dilakukan terutama dalam rangka mencegah pemajakan berganda akibat pengenaan pajak berulang atas penghasilan yang sama yang diterima oleh penduduk negara lainnya tersebut. Oleh karena itu, ketika suatu *Agen* atau *Nominee* yang merupakan penduduk dari suatu negara dalam perjanjian (*other contracting state*), menerima penghasilan dari negara sumber, maka pemberian fasilitas *tax treaty* kepadanya semata-mata berdasarkan fakta bahwa status penerima langsung penghasilan tersebut adalah penduduk di negara

³ Sebagaimana disebutkan pada paragraf 12 penjelasan terhadap Pasal 10 (*dividend*) OECD MTC 2002; paragraf 9 penjelasan terhadap Pasal 11 (*bunga*) OECD MTC 2002; serta paragraf 4 penjelasan terhadap Pasal 12 (*royalti*) OECD MTC 2012.

lain dalam perjanjian tersebut, dianggap tidak konsisten dengan tujuan pembentukan *tax treaty* (dalam konteks menghindari pemajakan berganda). Dalam hal ini, penerima penghasilan tersebut memang memenuhi persyaratan sebagai “penduduk” (resident) di negaranya. Namun karena penerima penghasilan tersebut bukan merupakan pemilik atau pihak penerima manfaat sebenarnya atas penghasilan tersebut, maka *Agen* atau *Nominee* dimaksud bukan merupakan pihak yang akan dikenakan pajak, sehingga sebenarnya tidak terdapat potensi pemajakan berganda.

Ketidakkonsistenan tersebut juga terjadi dalam hal fasilitas *tax treaty* diberikan kepada penduduk suatu negara, selain agen atau nominee, yang bertindak sebagai perantara atau penyalur (*conduit*) bagi pihak lain yang merupakan penerima manfaat yang sebenarnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam publikasi berjudul “*Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies*”, OECD Committee on Fiscal Affairs menyatakan bahwa *conduit companies* dikecualikan dari pengertian *beneficial owner* apabila wewenang yang dimilikinya sangat terbatas sehingga lebih menyerupai pelaksana administrasi dari pihak-pihak yang dibantu oleh nya (penerima manfaat yang sebenarnya).

Fasilitas pengurangan pajak di negara sumber tersebut tetap dapat diberikan, meskipun terdapat Agen atau nominee yang menjadi perantara antara pihak pembayar penghasilan dan penerima manfaat yang sebenarnya dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*), sepanjang *beneficial owner* merupakan penduduk dari negara lain dalam perjanjian tersebut⁴. Hingga OECD MTC versi 2010, OECD tetap menggunakan pemahaman yang sama terhadap konsep *beneficial owner* tersebut.

C. Beneficial Owner pada OECD MTC : Perkembangan Terkini

Prinsip *beneficial owner*, dalam perkembangannya, memiliki peran yang semakin penting terhadap aspek perpajakan atas transaksi lintas batas negara. Perbedaan pemahaman terhadap pengertian dan aplikasinya sering menjadi sumber sengketa tersendiri. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan terkini, pada bulan April 2011, OECD mempublikasikan draft diskusi untuk memperoleh masukan publik terhadap pengertian *Beneficial Owner* dalam *OECD Model Tax Convention*⁵ beserta aplikasinya. Dari berbagai masukan yang diperoleh, pada pertemuan yang diselenggarakan di kantor pusat OECD pada bulan September 2012, OECD Working Party-1 telah menyusun proposal revisi bunyi artikel 10, 11 dan 12 serta paragraf penjelasan terkait yang terdapat pada *OECD Model Tax Convention* versi 2010. Draft revisi tersebut kemudian dipublikasikan kembali untuk memperoleh masukan seluruh pihak dengan batas waktu penyampaian tanggapan pada tanggal 15 Desember 2012.

Dalam draft revisi tersebut, OECD mengusulkan untuk melakukan beberapa perubahan pokok dalam batang tubuh maupun bagian penjelasan OECD MTC versi 2010, sebagai berikut:

⁴ “Subject to other conditions imposed by the Article, the limitation of tax in the State of source remains available when an intermediary, such as an agent or nominee, is interposed between the beneficiary and the payer, in those cases where the beneficial owner is a resident of the Other Contracting State” (paragraf 12.2 penjelasan Pasal 10 OECD MTC 2002; paragraf 11 penjelasan Pasal 11 OECD MTC 2002; paragraf 4.2. penjelasan Pasal 12 OECD MTC 2002)

⁵ Publikasi tersebut berjudul “Clarification of the meaning of ‘beneficial owner’ in the OECD Model Tax Convention”, 29 April 2011.

1. Paragraf 12 penjelasan Pasal 10 (Dividend)

Untuk memberikan batasan yang lebih jelas mengenai substansi yang dibahas pada paragraf 12 penjelasan Pasal 10 (Dividend), OECD mengusulkan untuk membagi paragraf 12 tersebut ke dalam dua paragraf, yakni paragraf 12 dan paragraf 12.1.

Selain itu, OECD mengusulkan untuk mengganti kata *"immediately received by"* menjadi *"paid direct to"* pada paragraf 12 penjelasan Pasal 10 (*dividend*), sejalan dengan upaya menyelaraskan terhadap bunyi Pasal 10 ayat (1) yang menggunakan kalimat *"paidto a resident"*.

2. Paragraf 12.1 penjelasan Pasal 10 (Dividend)

Keberadaan terminologi *beneficial owner* pada OECD MTC sebenarnya bertujuan untuk mengklarifikasi makna kalimat *"paidto a resident"* sebagaimana tercantum pada bunyi Pasal 10 ayat 1 OECD MTC, sehingga dimaksudkan untuk diartikan dalam konteks tersebut dan bukan merujuk kepada definisi yang tersedia dalam pengaturan negara atau yurisdiksi tertentu⁶. Sejalan dengan pemahaman tersebut, dalam konteks penerapan *tax treaty*, sebuah *Trust* dapat saja dikategorikan sebagai *beneficial owner* meskipun *Trust Law* di negara tersebut tidak menyebutkan demikian.

Mengingat besarnya potensi ketidaksepahaman mengenai definisi *"beneficial owner"* tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa terminologi *"beneficial owner"* sebaiknya didefinisikan tersendiri dalam konteks penerapan *tax treaty*⁷, baik pada batang tubuh pasal terkait, maupun pada bagian penjelasan pasal dimaksud. Namun dengan pertimbangan bahwa pengertian *beneficial owner* tersebut telah mendapatkan pengaturan tersendiri di beberapa negara / yurisdiksi, maka beberapa pihak mengusulkan agar terminologi tersebut tidak diberi definisi tersendiri dalam OECD MTC. Selain itu, sebagian pihak memberikan pendapat bahwa pengaturan terkait prinsip *beneficial owner* dalam *domestic law* masing-masing negara atau yurisdiksi sebenarnya dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *beneficial owner* sebagaimana dimaksud dalam OECD MTC tersebut. Namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran, OECD Working Party memutuskan untuk tidak menyertakan keterangan tambahan yang menjelaskan relevansi pengaturan domestik atas prinsip *beneficial owner* dalam OECD MTC tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, OECD mengusulkan agar paragraf 12.1 penjelasan Pasal 10 (*dividend*) diubah menjadi berikut:

"12.1 Since the term "beneficial owner" was added to address potential difficulties arising from the use of the words "paid to ... a resident" in paragraph 1, it was intended to be interpreted in this context and not to refer to any technical meaning that it could have had under the domestic law of a specific country (in fact, when it was added to the paragraph, the term did not have a precise meaning in the law of many countries). The term "beneficial owner" is therefore not used in a narrow technical sense (such as the meaning that it has under the trust law of many common law countries1), rather, it should be

⁶ Selain itu, OECD menegaskan bahwa pada saat terminologi *beneficial owner* diperkenalkan dalam OECD MTC, banyak negara atau yurisdiksi yang tidak memiliki definisi tersendiri atas istilah dimaksud.

⁷ Pengertian tersendiri dalam konteks *Tax Treaty* ini diberi istilah *autonomous treaty meaning*.

understood in its context, in particular in relation to the words “paid ... to a resident”, and in light of the object and purposes of the Convention, including avoiding double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance”.

Footnote.12.1:

“For example, where the trustees of a discretionary trust do not distribute dividends earned during a given period, these trustees, acting in their capacity as such (or the trust, if recognised as a separate taxpayer), could constitute the beneficial owners of such income for the purposes of Article 10 even if they are not the beneficial owners under the relevant trust law”

3. Paragraf 12.2 dan paragraf 12.3 penjelasan Pasal 10 (Dividend)

Dengan tujuan untuk menjaga kejelasan substansi yang dibahas, OECD mengusulkan untuk membagi penjelasan pada paragraf 12.1 OECD MTC versi 2010 ke dalam paragraf 12.2. dan 12.3. Selain itu, OECD juga mengusulkan perubahan minor berupa penggantian kata *“immediately received by”* menjadi *“paid direct to”*. Tidak ada perubahan substantif yang dilakukan terhadap paragraf tersebut.

*“12.2 Where an item of income is **paid to** a resident of a Contracting State acting in the capacity of agent or nominee it would be inconsistent with the object and purpose of the Convention for the State of source to grant relief or exemption merely on account of the status of the **direct** recipient of the income as a resident of the other Contracting State. The **direct** recipient of the income in this situation qualifies as a resident but no potential double taxation arises as a consequence of that status since the recipient is not treated as the owner of the income for tax purposes in the State of residence”.*

“12.3 It would be equally inconsistent with the object and purpose of the Convention for the State of source to grant relief or exemption where a resident of a Contracting State, otherwise than through an agency or nominee relationship, simply acts as a conduit for another person who in fact receives the benefit of the income concerned. For these reasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitled “Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies”¹ concludes that a conduit company cannot normally be regarded as the beneficial owner if, though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powers which render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of the interested parties”.

[Footnote to paragraph 12.3]

*1. Reproduced at page R(6)-1 of Volume II of the **full-length** version of the OECD Model Tax Convention.*

4. Paragraf 12.4 penjelasan Pasal 10 (Dividend)

Dalam usulan paragraf ini, OECD memberikan penegasan bahwa *agent, nominee* dan *conduit companies* tidak dapat dikategorikan sebagai *beneficial owner* dengan pertimbangan bahwa hak penerima penghasilan dividend tersebut untuk menggunakan dan menikmati penghasilan yang diterimanya dibatasi oleh adanya kontrak atau kewajiban hukum lainnya yang mengharuskan ia menyerahkan penghasilan tersebut

kepada pihak lain. Keberadaan kewajiban tersebut dapat dilihat dari bukti kontrak atau dokumen hukum yang berhubungan langsung dengan penerimaan penghasilan dividend tersebut, maupun berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Terkait dengan hal tersebut, OECD juga menekankan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan *beneficial owner* dari penghasilan dividend tersebut tidak serta merta diartikan sebagai pemilik saham. Usulan tersebut dituangkan dalam draft berikut:

“In these various examples (agent, nominee, conduit company acting as a fiduciary or administrator), the recipient of the dividend is not the “beneficial owner” because that recipient’s right to use and enjoy the dividend is constrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person. Such an obligation will normally derive from relevant legal documents but may also be found to exist on the basis of facts and circumstances showing that, in substance, the recipient clearly does not have the right to use and enjoy the dividend unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person. This type of obligation must be related to the payment received; it would therefore not include contractual or legal obligations unrelated to the payment received even if those obligations could effectively result in the recipient using the payment received to satisfy those obligations. Examples of such unrelated obligations are those unrelated obligations that the recipient may have as a debtor or as a party to financial transactions or typical distribution obligations of pension schemes and of collective investment vehicles entitled to treaty benefits under the principles of paragraphs 6.8 to 6.34 of the Commentary on Article 1. Where the recipient of a dividend does have the right to use and enjoy the dividend unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person, the recipient is the “beneficial owner” of that dividend. It should also be noted that Article 10 refers to the beneficial owner of a dividend as opposed to the owner of the shares, which may be different in some cases.”

Proposal tersebut mendapatkan beberapa respons yang bersifat pro maupun kontra. Salah satu keberatan mendasar yang diajukan adalah pertimbangan mengenai dampak ketidakpastian yang ditimbulkannya bagi jenis-jenis transaksi keuangan tertentu, seperti transaksi perbankan atau transaksi pihak pemungut (*withholding agent*) yang tidak memiliki informasi penuh terhadap fakta-fakta (seperti bunyi kontrak) tersebut. Situasi lainnya yang dicontohkan adalah apabila penghasilan dividend yang diterima tersebut digunakan untuk membayar kewajiban lainnya, seperti kewajiban pembayaran bunga pinjaman kepada kreditor.

5. Paragraf 12.5 penjelasan Pasal 10 (Dividend)

Dalam paragraf 12.5 ini, OECD mengusulkan untuk memberi penegasan bahwa meskipun terdapat bukti bahwa penerima penghasilan dividend merupakan *beneficial owner*, fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber tersebut tidak disarankan untuk diberikan dalam hal terdapat penyalahgunaan (*abuse of provision or improper use of the Convention*). Meskipun prinsip *beneficial owner* diperkenalkan dalam OECD MTC dengan upaya untuk mengatasi jenis aktivitas pengelakan pajak⁸ tertentu, namun keberadaannya tidak dapat digeneralisasi sebagai anti avoidance rule bagi jenis aktivitas treaty shopping lainnya. OECD menuangkan prinsip tersebut dalam draft berikut:

⁸ Aktivitas penghindaran pajak tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk dengan cara mendirikan perusahaan perantara untuk menerima penghasilan dividend dan kemudian menyerahkannya kepada pihak lainnya.

“12.5 The fact that the recipient of a dividend is considered to be the beneficial owner of that dividend does not mean, however, that the limitation of tax provided for by paragraph 2 must automatically be granted. This limitation of tax should not be granted in cases of abuse of this provision (see also paragraphs 17 and 22 below). As explained in the section on “Improper use of the Convention” in the Commentary on Article 1, there are many ways of addressing conduit company and, more generally, treaty shopping situations. These include specific anti-abuse provisions in treaties, general anti-abuse rules and substance-over-form or economic substance approaches. Whilst the concept of “beneficial owner” deals with some forms of tax avoidance (i.e. those involving the interposition of a recipient who is obliged to pass on the dividend to someone else), it does not deal with other cases of treaty shopping and must not, therefore, be considered as restricting in any way the application of other approaches to addressing such cases.”

Proposal OECD yang mengaitkan keberadaan prinsip *beneficial owner* dengan *anti avoidance rule* tersebut mendapat keberatan dari beberapa pihak, dengan pertimbangan dapat menimbulkan misinterpretasi yang akhirnya justru menghambat tujuan pembentukan *tax treaty* sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan hubungan investasi dan perdagangan internasional. Namun demikian, OECD berpendapat bahwa tidak mungkin memisahkan sama sekali keberadaan prinsip *beneficial owner* dari penerapan *anti avoidance rule*.

6. Paragraf 12.6 Penjelasan Pasal 10 (Dividend)

Dalam paragraf 12.6, OECD menegaskan bahwa terminologi *beneficial owner* yang dimaksud dalam *tax treaty* tidak dapat diartikan sesuai dengan definisi dari terminologi serupa yang diberikan dalam konteks lainnya. Keberadaan terminologi *beneficial owner* pada OECD MTC sebenarnya bertujuan untuk mengklarifikasi makna kalimat *“paidto a resident”* sebagaimana tercantum pada bunyi Pasal 10 ayat 1 OECD MTC, dan bukan untuk menjelaskan issue mengenai kepemilikan saham pada perusahaan yang membayarkan penghasilan dividend tersebut. Dengan demikian, terminologi *beneficial owner* tersebut tidak dapat dikaitkan dengan definisi lain yang ditujukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hak penguasaan efektif (*ultimate effective control*) atas suatu entitas tertentu, seperti halnya definisi yang diberikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) dalam kerangka *Anti Money Laundering* (AML), maupun definisi yang diberikan dalam laporan OECD yang berjudul ***“Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes” (OECD, Paris, 2001)***,

Usulan tersebut dituangkan dalam draft berikut:

12.6 The above explanations concerning the meaning of “beneficial owner” make it clear that the meaning given to this term in the context of the Article must be distinguished from the different meaning that has been given to that term in the context of other instruments¹ that concern the determination of the persons (typically the individuals) that exercise ultimate control over entities or assets. That different meaning of “beneficial owner” cannot be applied in the context of the Article. Indeed, that meaning, which refers to natural persons (i.e. individuals), cannot be reconciled with the express wording of subparagraph 2 a), which refers to the situation where a company is the beneficial owner of a dividend. In the context of Article 10, the term “beneficial owner” is intended to address difficulties arising from the use of the words “paid to” in relation to dividends, rather than difficulties related to the owner of the shares of the company paying these dividends. For that

*reason, it would be inappropriate, in the context of that Article, to consider a meaning developed in order to refer to the individuals who exercise “ultimate effective control over a legal person or arrangement.”*²

[Footnotes to paragraph 12.6] :

1. See, for example, Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – The FATF Recommendations* (OECD-FATF, Paris, 2012), the Glossary to the Financial Action Task Force’s Forty Recommendations (http://www.fatfgafi.org/glossary/0,3414,en_32250379_32236930_35433764_1_1_1_1,00.html#34276864) which sets forth in detail the international anti-money laundering standard and which includes the following definition of beneficial owner (at page 109): “the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the person on whose behalf a transaction is being conducted. It also incorporates those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.” Similarly, the 2001 report of the OECD Steering Group on Corporate Governance, “Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes” (OECD, Paris, 2001), <http://publications.oecd.org/acrobatebook/2101131E.PDF>, at page 14, defines beneficial owner as follows (at page 14):
In this Report, “beneficial owner” refers to ultimate beneficial owner or interest by a natural person. In some situations, uncovering the beneficial owner may involve piercing through various intermediary entities and/or individuals until the true owner who is a natural person is found. With respect to corporations, owner is held by shareholders or members. In partnerships, interests are held by general and limited partners. In trusts and foundations, beneficial owner refers to beneficiaries, which may also include the settlor or founder.
2. See the Financial Action Task Force’s definition quoted in the previous note. Glossary to the Financial Action Task Force’s Forty Recommendations (http://www.fatfgafi.org/glossary/0,3414,en_32250379_32236930_35433764_1_1_1_1,00.html#34276864).

Beberapa komentar terhadap proposal tersebut menunjukkan persetujuan dengan proposal OECD untuk menunjukkan bahwa terminologi beneficial owner dalam konteks *tax treaty* harus dibedakan dari definisi dalam konteks lainnya tersebut. Namun demikian, OECD berpendapat, akan sulit merumuskan definisi umum terkait istilah *beneficial owner* tersebut, sehingga OECD memilih untuk tidak mendefinisikannya.

7. Paragraf 12.7 penjelasan Pasal 10 (Dividend)

Paragraf 12.7 merupakan pindahan dari bunyi paragraf 12.2 penjelasan Pasal 10 (2) OECD MTC versi 2010. OECD hanya mengusulkan perubahan minor pada paragraf tersebut, untuk memberikan informasi tambahan terkait periode dilakukannya *amendment terhadap OECD MTC* yang menjadi rujukan dalam paragraf dimaksud. Usulan tersebut dituangkan pada draft berikut:

12.7 Subject to other conditions imposed by the Article, the limitation of tax in the State of source remains available when an intermediary, such as an agent or

*nominee located in a Contracting State or in a third State, is interposed between the beneficiary and the payer but the beneficial owner is a resident of the other Contracting State (the text of the Model was amended in 1995 **and in [year of next update]** to clarify this point, which has been the consistent position of all member countries).*

Namun demikian, OECD mengusulkan perubahan pada bunyi batang tubuh Pasal 10 ayat (2) OECD MTC versi 2010 menjadi sebagai berikut:

Change to the preamble of paragraph 2 of Article 10:

2. However, such dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State may also be taxed in that State the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: ...

Sumber:

- *OECD Model Tax Convention version 1977, 2002, 2010*
- *OECD Steering Group on Corporate Governance Report: Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes" (OECD, Paris, 2001)*
- *Clarification of The Meaning of "Beneficial Owner" in the OECD Model Tax Convention; Discussion draft; 29 April 2011 to 15 July 2011*
- *Investigation and Information about Beneficial Owner and Control; Astera Primanto Bhakti; Materials presented during the OECD-Indonesia Policy Dialogue; Workshop on Disclosure of Beneficial Owner and Control at the Indonesia Stock Exchange Office held in 16 February 2012.*
- *OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the Meaning of Beneficial Owner in articles 10, 11, and 12 (19 October 2012 to 15 December 2012).*